

Bab I

Pendahuluan



Repository University Of Riau

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU

<http://repository.unri.ac.id/>

BAB I

PENDAHULUAN

Persatuan dan kesatuan bangsa masih akan mendapatkan berbagai tantangan baru dalam proses globalisasi dewasa ini. Seiring dengan itu, masalah keamanan dan ketertiban umum (*social order*) juga dihadapkan pada tantangan tersendiri pada era reformasi dan demokratisasi yang kini tengah dihadapi Indonesia. Bidang pertahanan keamanan juga masih memerlukan tingkat *sense of crisis* yang tinggi serta menuntut sikap dan komitmen bersama yang kuat segenap komponen bangsa untuk mengelolanya. Masalah separatisme, walaupun sudah melampaui masa-masa krisis terberatnya, jelas masih menjadi persoalan yang menghambat upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Penyelesaian konflik sosial dan pemulihan ketertiban umum juga masih terlalu dini, yang masih perlu dipelihara momentumnya dan dilanjutkan dengan proses rekonsiliasi sosial politik yang sungguh-sungguh antar berbagai kelompok yang terlibat dalam konflik perbedaan pandangan sosial politik, golongan dan etnis, serta perbedaan keyakinan agama.

Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini bangsa Indonesia baik

di pusat maupun di daerah mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Gejala perubahan sosial yang terjadi tidak saja dalam artian positif (*regressive*), tapi juga dalam bentuk negatif (*degressive*), seperti meningkatnya masalah-masalah sosial yang mengakibatkan rusaknya tatanan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi seperti kriminalitas, patologi sosial lainnya yang tidak terkendali, aksi-aksi protes massa, konflik horizontal dan berbagai konflik fisik antar etnis dan kelompok dalam masyarakat. Karena lamanya terjadi kerusuhan-kerusuhan di daerah-daerah konflik seperti di Aceh, Banyuwangi, Kupang, Ambon, Poso, Sampit, Batam, Bagan Siapi-api dan lain-lain telah mengakibatkan kadar nurani dan rasa cinta kasih terhadap sesama sebagian besar masyarakat menurun drastis. Hal ini sering menimbulkan perubahan-perubahan di luar kebiasaan-kebiasaan bangsa yang beradab.

Pada saat ini, harus diakui bahwa masyarakat secara umum belum seluruhnya mampu menggunakan hak-haknya, melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab sosialnya masing-masing secara bi-jaksana dan dengan tingkat toleransi sosial yang tinggi, sehingga tidak jarang sekelompok orang tertentu melakukan hal-hal yang bersifat anarkis dalam mengekspresikan aspirasinya sebagai warga negara. Sering pula terjadi perselisihan antar individu berkembang dan meluas menjadi konflik antar etnis, antar golongan, bahkan antar penganut agama yang mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum dan jatuhnya banyak korban jiwa yang tidak berdosa.

Tak terkecuali di Riau, gejolak berupa kerusuhan-kerusuhan sosial pernah melanda masyarakat di beberapa daerah yang mengarah pada konflik antar etnis, antara lain di Bagan Siapi-api, Duri, Selat Panjang, Tembilahan, Pekanbaru, Pasir Pengarayan, Pelalawan, Batam, Rengat dan lain-lain. Akibatnya banyak menelan korban jiwa dan harta benda sebagai ekspresi kebrutalan

kelompok-kelompok tertentu yang dilakukan atas dasar *stereotype ethnic* dan *prejudice*, maupun adanya pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam hubungan sosial antar etnik. Perampokan harta benda milik masyarakat Desa Tolan Baru, pengrusakan dan pembakaran rumah warga desa oleh karyawan PT. Torganda dan PT. Torus Ganda pada tanggal 18 Maret 1999, kemudian dibalas mahasiswa dengan pembakaran dan pengrusakan harta benda milik PT. Torganda Property di Pasir Putih Pekanbaru merupakan tindakan atau perbuatan kekerasan yang tidak sesuai dengan peradaban bangsa. Demikian pula bentrok fisik yang terjadi antara karyawan PT. RAPP dengan warga Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Rengat. Konflik antar kelompok etnik Melayu dengan Batak, Minang dengan Batak, Melayu dengan Minang di Duri dan Selat Panjang Kabupaten Bengkalis juga telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban nyawa di kedua belah pihak.

Khusus di Rokan Hilir (Bagan Siapi-api) sebagai salah satu kabupaten pemekaran di Propinsi Riau, dalam catatan sejarah pernah dilanda perang fisik pembasmian antar etnis. Masyarakat Bagan Siapi-api bersifat heterogen, sama halnya dengan daerah-daerah lainnya di Propinsi Riau (Melayu, China, Batak, Jawa, Minang dan lain-lain). Latar belakang perbedaan etnis ini setiap saat dapat meledak menjadi konflik antar kelompok etnis karena mengandung benih-benih perbedaan sosial yang tajam antar kelompok dan golongan.

Secara geografis, wilayah Rokan Hilir terbuka bagi migran dari daerah lain. Lancarnya arus transportasi melalui jalur darat yang dikenal sebagai jalur timur Sumatera menghubungkan Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Sumatera Barat dan Pulau Jawa melalui Kabupaten Rokan Hilir ini telah meningkatkan arus penduduk pendatang yang mengadu nasib ke kota-kota di wilayah ini, seperti Bagan Batu, Ujung Tanjung, Bagan Siapi-api, Kubu,

Panipahan dan sebagainya. Bahkan memungkinkan para pelarian dari daerah lain berpindah ke daerah ini dan masuk menjadi karyawan perkebunan di pedalaman yang kadang kala dijadikan sebagai tempat persembunyiannya. Apabila petugas pemerintah desa setempat tidak selektif terhadap kelompok pendatang demikian, dapat mencuatkan konflik sosial yang mendalam, gejala etnosentrisme, egoisme, fanatikisme, daerah-isme dan isme-isme lainnya akan mudah berkembang dan sulit dikendalikan bahkan dapat menghambat pembangunan daerah. Buktinya, masih segar dalam ingatan kita bahwa Bagan Siapi-api dilanda konflik antar kelompok masyarakat akibat rencana program pembangunan Ibukota Kabupaten di Ujung Tanjung. Sebelum itu, Kantor Dinas Kehutanan di Kota Bagan Siapi-api diporakporandakan massa buruh galangan kapal yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah bidang kehutanan yang melarang peredaran kayu ilegal dan dianggap menghancurkan sumber mata pencahariannya.

Dalam rangka mengantisipasi gejala konflik horizontal di Kabupaten Rokan Hilir yang setiap saat dapat mengancam integrasi bangsa dan dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan era otonomi daerah, maka langkah awal yang perlu dilakukan sebelum mengambil kebijakan program persatuan dan kesatuan bangsa perlu diadakan studi tentang integrasi sosial dan konflik horizontal yang selama ini belum pernah dilakukan. Tujuan dari studi ini adalah: *pertama*, mengkaji faktor-faktor apa saja yang dapat mempererat integrasi sosial antar etnis di di Rokan Hilir, seklaigus dapat meredakan konflik horizontal yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, merumuskan model kebijakan program pembangunan di bidang Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebagai bagian dari pembangunan bidang sosial politik di Kabupaten Rokan Hilir dalam era otonomi daerah.